

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Keadaan Umum Daerah Penelitian

4.1.1. Keadaan Alam

4.1.1.1. Letak dan Batas Wilayah

Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten dari 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah. Menurut BAPPEDA dan BPS Kabupaten Semarang (2014) letak astronomis Kabupaten Semarang yaitu $110^{\circ} 14' 54,74''$ – $110^{\circ} 39' 3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 3' 57''$ - $7^{\circ} 30'0''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,674 ha atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kota Semarang dan Kabupaten Demak
Sebelah Timur	: Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali
Sebelah Selatan	: Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang
Sebelah Barat	: Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kendal

Ditengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang terdapat Kota Salatiga (Lampiran 2).

Kecamatan Suruh merupakan Kecamatan di Kabupaten Semarang yang merupakan lokasi penelitian. BAPPEDA dan BPS Kabupaten Semarang merilis Data Strategis Kecamatan Suruh Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Kecamatan

Suruh berjarak 48 km dari ibukota Kabupaten Semarang dan 15 km dari Kota Salatiga. Secara administratif, wilayah Kecamatan Suruh berbatasan dengan (Lampiran 3) :

Sebelah Barat	: Kecamatan Tengaran
Sebelah Timur	: Kecamatan Boyolali
Sebelah Utara	: Kecamatan Bancak dan Kecamatan Pabelan
Sebelah Selatan	: Kecamatan Susukan

4.1.1.2. Topografi Wilayah

Berdasarkan data BAPPEDA dan BPS Kabupaten Semarang (2014) bahwa Kabupaten Semarang terletak pada ketinggian 310 – 1.450 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan wilayah terendah berada di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus yang mana ketinggiannya hanya 310 meter di atas permukaan laut dan wilayah tertinggi di Desa Batur Kecamatan Getasan dengan ketinggian mencapai 1.450 meter di atas permukaan laut dan rata-rata ketinggian 607 meter di atas permukaan laut. Keadaan topografi wilayah Kabupaten Semarang sangat bervariasi dari datar, bergelombang, bukit/ gunung, dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Kondisi topografi yang beragam, menyebabkan Kabupaten Semarang memiliki potensi untuk budidaya berbagai jenis tanaman. Berikut adalah klasifikasi wilayah Kabupaten Semarang berdasarkan topografi menurut data BAPPEDA dan BPS Kabupaten Semarang (2014) :

- a. wilayah datar (kemiringan 0-2 %) sebesar 6.169 hektar
- b. wilayah bergelombang (kemiringan 2-15 %) sebesar 57.659 hektar

- c. wilayah curam (kemiringan 15-40 %) sebesar 21.725 hektar
- d. wilayah sangat curam (kemiringan >40 %) sebesar 9.467,67 hektar

Menurut data BAPPEDA dan BPS Kabupaten Semarang (2014) secara geografis Kabupaten Semarang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai diantaranya :

- a. Gunung Ungaran, meliputi Kecamatan Ungaran, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bawen.
- b. Gunung Telomoyo, meliputi Kecamatan Getasan dan Kecamatan Banyubiru.
- c. Gunung Merbabu, meliputi wilayah Kecamatan Getasan dan Kecamatan Tengaran.
- d. Pegunungan Sewakul terletak di Kecamatan Ungaran.
- e. Pegunungan Kalong terletak di Kecamatan Ungaran.
- f. Pegunungan Pasokan, Kredo, Tengis meliputi Kecamatan Kecamatan Pabelan.
- g. Pegunungan Ngebleng dan Gunung Tumpeng terletak di Kecamatan Suruh.
- h. Pegunungan Rong terletak di Kecamatan Tuntang.
- i. Pegunungan Sodong terletak di Kecamatan Tengaran.
- j. Pegunungan Pungruk terletak di Kecamatan Bringin.
- k. Pegunungan Mergi terletak di Kecamatan Bergas.

Perairan darat di Kabupaten Semarang yang berupa sungai/kali dan danau/rawa berdasarkan BAPPEDA dan BPS Kabupaten Semarang (2014) yaitu :

- a. Sungai garang, yang melalui sebagian Kecamatan Ungaran dan Kecamatan Bergas.
- b. Rawa Pening meliputi sebagian dari Kecamatan Jambu, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Getasan, Kecamatan Bawen dan Kecamatan Tuntang.
- c. Sungai Tuntang, yang melalui sebagian dari Kecamatan Tuntang, Kecamatan Bringin, Kecamatan Bawen dan Kecamatan Pringapus.
- d. Sungai Senjoyo, melalui sebagian dari Kecamatan Getasan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Tenganan, Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Bringin.

4.1.1.3. Iklim

Iklim merupakan faktor penting dan utama dalam pengelolaan usahatani. Keadaan iklim di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh suhu, curah hujan, ketinggian tempat, musim, angin dan sinar matahari. Kabupaten Semarang beriklim tropis yang mempunyai dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Suhu udara di Kabupaten Semarang berkisar antara $17,2^{\circ}\text{C}$ – $31,6^{\circ}\text{C}$. Kelembaban udara berkisar 80–81%. Menurut data BAPPEDA dan BPS Kabupaten Semarang (2014) rata-rata curah hujan selama Tahun 2013 cenderung tinggi, yaitu sebesar 2.201 mm. Kecamatan dengan curah hujan tinggi adalah Kecamatan Getasan (3.193 mm) sedangkan kecamatan dengan curah hujan terendah yaitu Kecamatan Bancak (742 mm). Selama Tahun 2013 banyaknya hari terjadinya hujan adalah pada bulan Januari, April dan Desember, sedangkan pada

bulan Agustus dan September frekuensi hujan cenderung sangat sedikit. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari (5.833 mm) dan April (5.556 mm) sedangkan terkecil di bulan Agustus (360 mm) dan September (161 mm). Hampir setiap bulan selama Tahun 2013 terjadi turun hujan sehingga wilayah Kabupaten Semarang tidak terjadi kekeringan/kemarau.

4.1.1.4. Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Semarang berdasarkan BAPPEDA dan BPS Kabupaten Semarang (2014) yaitu tanah grumosol, latosol, aluvial, regosol, podsolik dan tanah berasosiasi seperti pada penjelasan berikut :

a) Tanah Grumosol

Tanah Grumosol merupakan tanah yang memiliki tekstur lempung berliat-liat yang berwarna kelabu sampai hitam. Kandungan bahan organik tanah grumosol pada lapisan tanah atas yaitu antara 1–3 % (Hanafiah, 2005). Tanah grumosol memiliki daya yang cukup baik untuk menahan air sehingga cocok untuk pertanian maupun perkebunan. Tanaman yang dapat tumbuh di tanah grumosol adalah padi, jagung, kedelai, tebu, tembakau, dan jati. Menurut BAPPEDA dan BPS Kabupaten Semarang (2014), wilayah yang terdapat tanah seperti ini adalah di sekitar Rawa Pening.

b) Tanah Latosol

Jenis tanah latosol umumnya berwarna merah, coklat hingga kuning yang mana pada lapisan tanah atas hingga ke bawah bertekstur liat (Hanafiah, 2005). Jenis tanah ini memiliki kelebihan dapat menahan air sehingga cukup baik untuk

pertanian. Beberapa tanaman yang cocok dibudidayakan di tanah latosol yaitu tembakau, kakao atau coklat, tebu, panili dan pala. Menurut BAPPEDA dan BPS Kabupaten Semarang (2014), daerah yang terdapat jenis tanah latosol coklat merah yaitu Kecamatan Ungaran, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Bringin, Kecamatan Suruh, Kecamatan Tengaran dan Kecamatan Pabelan. Sedangkan daerah yang terdapat jenis tanah latosol kuning terdapat di Kecamatan Ungaran.

c) Tanah Aluvial

Tanah aluvial memiliki warna kelabu atau coklat dengan tekstur tanah yang liat berpasir (Hanafiah, 2005). Tanah ini cukup peka terhadap erosi sehingga baik untuk pertanian maupun perikanan. Tanaman yang cocok dibudidayakan di tanah aluvial yaitu padi serta palawija seperti jagung, tembakau dan jenis tanaman lainnya. Menurut BAPPEDA dan BPS Kabupaten Semarang (2014), wilayah yang terdapat jenis tanah aluvial kelabu yaitu di Kecamatan Susukan dan Kecamatan Bringin. Aluvial kuning terdapat di Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Banyubiru. Aluvial coklat kuning terdapat di Kecamatan Getasan dan Kecamatan Susukan.

d) Tanah Regosol

Tanah regosol adalah tanah yang berasal dari material gunung berapi yang mana tanahnya berbutir kasar. Tanah regosol merupakan tanah aluvial yang baru diendapkan. Sifat dari tanah regosol yaitu subur, peka terhadap erosi, berwarna keabuan, kaya unsur hara seperti P dan K yang masih segar, memiliki kemampuan menyerap air tinggi (Hanafiah, 2005). Tanah ini sangat cocok untuk ditanami

padi, kelapa, tebu, tembakau dan sayur-sayuran. Menurut BAPPEDA dan BPS Kabupaten Semarang (2014), daerah yang terdapat jenis tanah regosol coklat yaitu di Kecamatan Ungaran, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Jambu.

e) Tanah Podsolit

Tanah ini terbentuk akibat suhu yang rendah serta curah hujan yang tinggi. Tanah ini bersifat miskin akan unsur hara sehingga tidak subur dan memiliki warna merah sampai kuning (Hanafiah, 2005). Tanah jenis ini cocok untuk pertumbuhan tanaman kelapa dan jambu mente. Menurut BAPPEDA dan BPS Kabupaten Semarang (2014), daerah yang terdapat jenis Podsolit yaitu di Kecamatan Bringin, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Getasan, Kecamatan Ungaran.

f) Tanah-tanah yang berasosiasi

Tanah-tanah yang berasosiasi merupakan kombinasi atau perpaduan dari dua jenis tanah yang sulit untuk dibedakan atau dipisahkan (Hanafiah, 2005). Menurut BAPPEDA dan BPS Kabupaten Semarang (2014), Asosiasi latosol regosol terdapat di Kecamatan Getasan dan asosiasi aluvial glei terdapat di Kecamatan Bringin, Kecamatan Suruh dan Kecamatan Susukan.

4.1.1.5. Pemanfaatan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Semarang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu lahan pertanian sawah, lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Menurut BAPPEDA dan BPS (2014) bahwa lahan pertanian sawah meliputi

sawah irigasi, tadah hujan, pasang surut, lebak dan lainnya. Lahan bukan pertanian meliputi tegal, ladang/huma, kolam/empang, padang, sementara tidak diusahakan dan lainnya. Lahan bukan pertanian meliputi rumah, bangunan, hutan negara, rawa, jalan, sungai, kuburan dan lain-lain. Sebagian besar penggunaan lahan di Kabupaten Semarang merupakan lahan pertanian yang terdiri dari lahan sawah dan bukan sawah, sedangkan sisanya merupakan lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Semarang dapat dilihat dari Tabel 2.

Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan di Kabupaten Semarang Tahun 2013

No.	Penggunaan Lahan	Luas ----ha----	Persentase ----%----
1	Pertanian Sawah	23.919,51	25,17
2	Pertanian Bukan Sawah	36.360,07	38,27
3	Bukan Pertanian	34.741,09	36,56
	Jumlah	95.020,67	100,00

Sumber : BAPPEDA dan BPS Kabupaten Semarang, 2014.

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa luas wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,67 ha dan secara umum dimanfaatkan sebagai lahan pertanian sawah sebesar 23.919,51 ha atau 25,17%. Luas lahan pertanian bukan sawah sebesar 36.360,07 ha atau 38,27% sedangkan luas penggunaan lahan bukan pertanian sebesar 34.741,09 ha atau sebesar 36,56%. Menurut data BAPPEDA dan BPS Kabupaten Semarang Tahun 2014 menyatakan bahwa luas lahan sawah di Kabupaten Semarang sangat tidak merata jika dilihat dari perbandingan luas lahan sawah antar kecamatan. Kecamatan Suruh, Pabelan dan Bringin mempunyai luas lahan sawah lebih dari 2.000,00 ha sedangkan Kecamatan Getasan hanya memiliki luas lahan sawah 26,00 ha.

Kabupaten Semarang juga mengalami hal yang sama jika berkaitan dengan konversi lahan pertanian seperti kabupaten lain di Jawa Tengah. Menurut data BAPPEDA dan BPS Kabupaten Semarang Tahun 2014 menyatakan bahwa luas lahan sawah Kabupaten Semarang Tahun 2013 tercatat seluas 23.919,51 ha, dibandingkan dengan kondisi Tahun 2012 dengan luas 23.921,27 ha terjadi penurunan seluas 1,76 ha. Rohmadiani (2011) menyatakan bahwa faktor yang mendorong perubahan lahan adalah faktor ekonomi seperti adanya pembangunan untuk perumahan, kawasan industri, pelebaran jalan, pertokoan, fasilitas umum lainnya dan lain-lain yang menggunakan lahan sawah. Adanya konversi lahan di Kabupaten Semarang, baik yang digunakan untuk perumahan, industri, jalan dan lain sebagainya membutuhkan perhatian dari semua kalangan karena akan berdampak pada penurunan produksi beras. Hal ini mengingat posisi Kabupaten Semarang yang merupakan salah satu daerah penunjang ketersediaan pangan di Jawa Tengah. Hidayati dan Kinseng (2013) menyatakan bahwa dampak negatif konversi lahan sawah adalah penurunan produksi padi yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional, pendapatan petani menurun, meningkatnya kemiskinan dan dampak negatif lainnya.

Wahyuningum (2015) menyatakan bahwa lahan merupakan material dasar dari suatu lingkungan, yang diartikan berkaitan dengan sejumlah karakteristik alami, iklim, geologi, tanah, topografi, hidrologi dan biologi. Pada Tabel 3 menggambarkan tentang penggunaan lahan di Kecamatan Suruh, dimana wilayah Kecamatan Suruh yaitu 6.401,48 ha yang terdiri dari lahan pertanian sawah, lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Sebagian besar penggunaan

lahan di Kecamatan Suruh adalah untuk lahan pertanian sawah. Hidayati dan Kinseng (2013) mengatakan bahwa lahan pertanian merupakan lahan yang diperuntukkan untuk kegiatan pertanian.

Tabel 3. Luas Lahan menurut Penggunaannya di Kecamatan Suruh Tahun 2014

No.	Penggunaan Lahan	Luas	Persentase
		-----ha-----	-----%-----
1.	Pertanian Sawah	2.951,63	46,10
	1. Irigasi	1.852,32	28,93
	2. Tadah Hujan	1.099,31	17,17
	3. Pasang Surut	-	-
	4. Lebak	-	-
	5. Lainnya	-	-
2.	Pertanian Bukan Sawah	1.379,08	21,54
	1. Tegal	987,59	15,42
	2. Ladang/Huma	-	-
	3. Perkebunan	97,29	1,52
	4. Hutan Rakyat	294,20	4,59
	5. Tambak	-	-
	6. Kolam/ empang	-	-
	7. Padang	-	-
	8. Sementara Tidak Diusahakan	-	-
	9. Lainnya	-	-
3.	Bukan Pertanian	2.070,77	32,34
	1. Rumah, Bangunan	1.909,72	29,83
	2. Hutan Negara	-	-
	3. Rawa	-	-
	4. Lainnya (Jalan, Sungai, kuburan, dll)	161,05	2,51
Jumlah		6.401,48	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2012.

Tabel 3 menggambarkan tentang penggunaan lahan di Kecamatan Suruh, dimana wilayah Kecamatan Suruh yaitu 6.401,48 ha. Luas lahan pertanian sawah mencapai 2.951,63 ha atau 46,10% yang terdiri dari sawah irigasi yaitu 1.852,32 ha atau 28,93% dan tadah hujan yaitu 1.099,31 ha atau 17,17%, sedangkan sawah

pasang surut, lebak dan lainnya adalah 0,00. Luas lahan pertanian bukan sawah mencapai 1.379,08 ha atau 21,54%. Luas lahan pertanian bukan sawah ini terdiri dari tegal yang mencapai 987,59 ha atau 15,42%, perkebunan yang mencapai 97,29 ha atau 1,52%, hutan rakyat yang mencapai 294,20 ha atau 4,59% serta ladang/huma, tambak, kolam/empang, padang, sementara tidak diusahakan dan lainnya mencapai 0,00. Lahan bukan pertanian memiliki luas 2.070,77 ha atau 32,34% yang terdiri dari rumah atau bangunan seluas 1.909,72 ha atau 29,83%, hutan negara dan rawa sebesar 0,00 serta lainnya (jalan, sungai, kuburan, dll) yang mencapai 161,05 ha atau 2,51%. Berdasarkan perbandingan antara lahan sawah (46,10%) dan bukan sawah (21,54%) dapat diartikan bahwa sebagian besar masyarakat di Kecamatan Suruh masih banyak menggantungkan hidupnya disektor pertanian. Hal ini sesuai dengan Hasil Sensus Pertanian Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Kecamatan Suruh merupakan kecamatan di Kabupaten Semarang dengan jumlah petani terbanyak yaitu 12.747 jiwa.

4.1.2. Keadaan Penduduk

4.1.2.1. Perkembangan Penduduk

Penduduk merupakan komponen penting dalam kegiatan ekonomi untuk pembangunan perekonomian suatu wilayah. Perkembangan penduduk suatu daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Perkembangan penduduk di Kabupaten Semarang selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Semarang Tahun 2011-2016

Tahun	Jumlah Penduduk -----jiwa-----	Laju Pertumbuhan Penduduk -----%-----
2011	938.802	0,54
2012	944.277	0,58
2013	949.815	0,59
2014	955.481	0,60
2015	961.421	0,60
Jumlah	4.749.796	2,88

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2016.

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Semarang dari Tahun 2011 sampai 2015 terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2011 jumlah penduduk di Kabupaten Semarang mencapai 938.802 jiwa dan terus mengalami peningkatan hingga Tahun 2015 yang berjumlah 961.421 jiwa. Menurut Munir (2007) bahwa peningkatan jumlah penduduk yang cepat dapat disebabkan oleh penurunan tingkat kematian akibat dari teknologi bidang kedokteran, perbaikan taraf hidup dan peningkatan keadaan sosial masyarakat yang tidak diikuti dengan penurunan tingkat kelahiran serta adanya migrasi yang semakin besar dari tahun ke tahun. Namun, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi sumber masalah, salah satunya seperti masalah mengenai kebutuhan pangan yang semakin meningkat, oleh karena itu diperlukan peningkatan ketersediaan pangan. Menurut Soekirman (2000) bahwa ketersediaan pangan untuk penduduk harus mencakup segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanan. Hal ini dimaksudkan agar dapat mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk di Kabupaten Semarang sehingga setiap penduduk bisa mengakses

pangan dengan baik, yang nantinya akan menciptakan ketahanan pangan rumah tangga penduduk tersebut.

4.1.2.2. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Kabupaten Semarang terdiri dari 17 Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan kepadatan penduduk yang berbeda antar kecamatan. Berikut adalah tabel jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kabupaten Semarang Tahun 2015.

Tabel 5. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Semarang Tahun 2015

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
	Laki-laki	Perempuan		
-----tahun-----	-----jiwa-----			-----%-----
0 – 14	118.511	111.362	229.873	23,93
15 - 64	322.722	335.190	657.192	68,41
>65	32.692	40.944	73.636	7,66
Jumlah	473.925	487.496	960.701	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2016.

Mantra (2007) menyatakan bahwa umur produktif untuk negara maju yaitu 15-64 tahun sedangkan untuk negara berkembang yaitu 15-59 tahun. Tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada pada usia 15-64 tahun yaitu sebesar 68,41% sedangkan jumlah penduduk usia 0-14 tahun hanya sebesar 23,93% serta penduduk usia lebih dari 65 tahun hanya sebesar 7,66%. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Semarang masih produktif sehingga memiliki banyak peluang untuk bekerja. Adanya peluang untuk bekerja ini nantinya akan berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga sehingga akan menunjang rumah

tangga tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Harwati (2005) bahwa pendapatan dipengaruhi oleh umur yang mana semakin tua umur maka produktivitas dalam bekerja akan menurun sehingga memiliki sedikit peluang untuk bekerja.

Selain itu dengan melihat Tabel 5 dapat diketahui besarnya *sex ratio* dan Angka Beban Tanggungan (ABT). *Sex ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan. Angka Beban Tanggungan (ABT) merupakan perbandingan antara penduduk usia non produktif dengan penduduk usia produktif dan menunjukkan persentase penduduk usia non produktif yang dianggap menjadi tanggungan penduduk usia produktif. *Sex ratio* dan Angka Beban Tanggungan (ABT) dapat dihitung menggunakan rumus seperti berikut :

$$\text{SexRatio} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Laki-laki}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan}} \times 100\% \dots\dots\dots (4)$$

$$\text{ABT} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Usia Non Produktif}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Produktif}} \times 100\% \dots\dots\dots (5)$$

Berdasarkan perhitungan *sex ratio* dapat diketahui nilai *sex ratio* di Kabupaten Semarang adalah 97,22%. Hal ini berarti dalam 100 orang penduduk perempuan terdapat 97 orang penduduk laki-laki. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Semarang lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki. Perhitungan ABT menunjukkan bahwa nilai ABT di Kabupaten Semarang sebesar 46,18% yang artinya bahwa setiap 100 orang usia produktif harus menanggung 46 orang usia non produktif. Hal ini berarti bahwa beban yang harus ditanggung kelompok umur usia produktif untuk

mengeluarkan sebagian dari pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum atau sudah tidak produktif relatif sedikit sehingga dapat dikatakan bahwa penduduk di Kabupaten Semarang relatif sejahtera. Hal ini sesuai pendapat Djiwandi (2002) bahwa semakin besar jumlah beban tanggungan yang harus ditanggung oleh seseorang atau kepala keluarga maka anggaran belanjanya juga akan semakin besar sehingga sebagian besar pendapatannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangannya saja, sehingga kesejahteraan seseorang atau kepala keluarga tersebut berkurang.

Tabel 6. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Tahun 2015

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
	Laki-laki	Perempuan		
---tahun---	-----jiwa-----			---%---
0 – 14	5.607	5.474	11.081	22,50
15 – 64	16.886	17.169	34.055	69,16
>65	1.816	2.286	4.102	8,33
Jumlah	24.309	24.929	49.238	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2016.

Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Suruh sebesar 49.238 jiwa yang terdiri dari 24.309 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 24.929 jiwa berjenis kelamin perempuan. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan Suruh adalah usia produktif sebesar 34.055 jiwa atau 69,16%, selanjutnya yaitu usia 0-14 tahun sebesar 11.081 jiwa atau 22,5%, kemudian penduduk usia lebih dari 65 tahun yaitu sebesar 4.102 jiwa atau 8,33%. Perbandingan penduduk di Kecamatan Suruh yaitu antara penduduk dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada laki-laki yaitu sebesar

24.929 sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 24.309. Nilai *sex ratio* di Kecamatan Suruh adalah 97,51%. Hal ini berarti dalam 100 orang penduduk perempuan terdapat 98 orang penduduk laki-laki. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk perempuan di Kecamatan Suruh lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki. Sedangkan perhitungan ABT menunjukkan bahwa nilai ABT di Kecamatan Suruh sebesar 44,58% yang artinya bahwa setiap 100 orang usia produktif harus menanggung 45 orang usia non produktif. Sianipar *et al.* (2012) menyatakan bahwa jumlah beban tanggungan yang harus ditanggung oleh keluarga atau seseorang mempengaruhi ketahanan pangannya sehingga akan berdampak pada tingkat kesejahteraannya. Beban yang harus ditanggung kelompok umur usia produktif di Kecamatan Suruh relatif sedikit sehingga penduduk di Kecamatan Suruh sejahtera.

4.1.2.3. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian

Umumnya mata pencaharian penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jumlah lapangan kerja yang tersedia serta ketrampilan dan modal yang dimiliki. Kabupaten Semarang merupakan daerah dengan mata pencaharian penduduknya didominasi oleh petani yaitu sebesar 35,9%. Banyaknya penduduk yang bermata pencaharian di sektor pertanian, maka mampu memberikan kontribusi pendapatan bagi penduduknya. Selain itu secara tidak langsung juga dapat mendukung ketersediaan pangan di Kabupaten Semarang yang mana akan berdampak pada ketahanan pangan di wilayah tersebut. Berikut

adalah tabel jumlah penduduk menurut mata pencaharian di Kabupaten Semarang Tahun 2014.

Tabel 7. Komposisi Penduduk Kabupaten Semarang menurut Mata Pencaharian Tahun 2014

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk -----jiwa-----	Persentase -----%-----
1.	Pertanian	182.275	35,90
2.	Industri	112.991	22,20
3.	Perdagangan	81.422	16,00
4.	Jasa Kemasyarakatan	68.631	13,50
5.	Konstruksi	32.561	6,40
6.	Angkutan dan Komunikasi	18.457	3,60
7.	Keuangan dan Jasa Perusahaan	4.376	0,90
8.	Lainnya	4.188	0,80
9.	Listrik dan Air Minum	1.472	0,30
10.	Pertambangan	1.425	0,30
	Jumlah	507.798	100,00

Sumber : BAPPEDA dan BPS Kabupaten Semarang, 2014.

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa sisi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian masih mendominasi dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 182.275 orang atau 35,90%, kemudian sektor industri 112.991 orang atau 22,20%, sektor perdagangan sebanyak 81.422 orang atau 16,00%, sektor jasa kemasyarakatan 68.631 orang atau 13,50%, konstruksi 32.561 atau 6,40%, sedangkan sisanya terbagi ke empat sektor lainnya.

Perbandingan penduduk di Kabupaten Semarang yang bermata pencaharian disektor pertanian lebih banyak dibandingkan penduduk yang bekerja di sektor industri. Hal ini dapat disebabkan oleh potensi lahan yang baik untuk daerah pertanian. Menurut data dari BAPPEDA dan BPS Kabupaten Semarang Tahun 2014 bahwa Kabupaten Semarang dikenal memiliki jenis tanah tanah

grumosol, latosol, aluvial, regosol, podsolik dan tanah berasosiasi. Hanafiah (2005) menyatakan bahwa tanah latosol dikenal dapat menahan air sehingga cukup baik untuk pertanian. Begitu juga dengan tanah regosol yang dikenal subur, peka terhadap erosi, berwarna keabuan, kaya unsur hara seperti P dan K yang masih segar, kemampuan menyerap air tinggi, sehingga wajar jika sektor pertanian menyerap banyak tenaga kerja di Kabupaten Semarang dari pada sektor lainnya.

4.1.3. Keadaan Pertanian

Keadaan pertanian di suatu daerah dapat dilihat dari luas panen, produksi dan produktivitas pertanian di daerah tersebut. Ketersediaan pangan, penganekaragaman pangan suatu daerah dapat dilihat dari keadaan sektor pertaniannya, yang nantinya akan berpengaruh pada ketahanan pangan di daerah tersebut.

Tabel 8. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan di Kabupaten Semarang Tahun 2014

No.	Jenis Tanaman	Luas Panen ----ha----	Produksi ----ton----	Produktivitas ---ton/ha---
1.	Padi Sawah	37.172	211.818	5,70
2.	Padi Ladang	1.337	2.989	2,24
3.	Jagung	13.575	71.814	5,29
4.	Kedelai	145	193	1,33
5.	Ubi Kayu	1.812	41.871	23,11
6.	Ubi Jalar	1.186	27.562	23,24
7.	Kacang Tanah	2.301	2.988	1,30
	Jumlah	57.528	359.235	62,21

Sumber : BPS_a Kabupaten Semarang, 2014.

Tabel 8 menunjukkan bahwa Kabupaten Semarang memiliki tujuh komoditas tanaman pangan yang meliputi padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah. Dari ke tujuh komoditas tersebut komoditas padi sawah memiliki luas panen, produksi serta produktivitas yang tinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya yaitu sebesar 37.172 ha, 211.818 ton dan 5,70 ton/ha. Kemudian di posisi kedua terdapat komoditas jagung dengan luas lahan 13.575 ha, produksinya mencapai 71.814 ton serta produktivitasnya 5,29 ton/ha. Sisanya terdapat komoditas kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, padi ladang dan kedelai.

Tingginya produksi padi sawah di Kabupaten Semarang didukung oleh topografi maupun potensi lahan yang baik untuk pertumbuhan padi sawah. Menurut BAPPEDA dan BPS Kabupaten Semarang Tahun 2014 bahwa topografi Kabupaten Semarang yang terdiri dari dataran rendah maupun bergelombang dapat digunakan untuk budidaya padi sawah. Sedangkan potensi lahan seperti jenis tanah regosol yang mana menurut Hanafiah (2005) bahwa tanah regosol merupakan jenis tanah yang cocok untuk budidaya padi sawah. Selain itu Kabupaten Semarang memiliki tiga sungai dan satu rawa seperti Sungai Garang, Sungai Tuntang, Sungai Senjoyo dan Rawa Pening yang dapat menunjang sarana irigasi.

4.1.4. Keadaan Perekonomian

Umumnya keadaan perekonomian di suatu daerah dapat dilihat dari ketersediaan sarana perekonomian untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Sarana perekonomian yang menunjang diharapkan mampu untuk dapat menyalurkan produksi pertanian dari produsen ke konsumen untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, tetapi keadaan perekonomian dapat berkembang bukan hanya didukung oleh jumlah sarana perekonomian saja, melainkan harus didukung juga oleh sarana perhubungan dan transportasi yang memadai. Jumlah sarana perekonomian yang terdapat di Kabupaten Semarang dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Jumlah Sarana Perekonomian di Kabupaten Semarang Tahun 2013

No.	Sarana Perekonomian	2013
		-----buah-----
1.	Jumlah Pasar	134
	1. Toko Modern	89
	2. Super Market	5
	3. Pasar Umum	33
	4. Pasar Hewan	6
	5. Pasar Sayur-sayuran	1
2.	Sarana Perdagangan	2.690
	1. Mini Market	121
	2. Toko/warung klontong	2.487
	3. Restaurant/rumah makan	82
3.	Koperasi	662
	Jumlah	3.889

Sumber : BAPPEDA dan BPS Kabupaten Semarang, 2014.

Tabel 9, terlihat bahwa sarana perekonomian di Kabupaten Semarang ditunjang dengan jumlah pasar, sarana perdagangan dan koperasi. Jumlah pasar meliputi toko modern sebanyak 89, super market sebanyak 5, pasar umum sebanyak 33, pasar hewan sebanyak 6 dan pasar sayur-sayuran berjumlah 1. Sedangkan untuk sarana perdagangan meliputi mini market yang berjumlah 121, toko/warung klontong berjumlah 2.487 dan restaurant atau rumah makan yang

berjumlah 82. Selanjutnya terdapat koperasi yang berjumlah 662. Koperasi ini terdiri dari koperasi serba usaha yang berjumlah 210, koperasi pertanian berjumlah 139, KPRI berjumlah 104 dan koperasi karyawan berjumlah 71. Saat ini, tidak semua koperasi yang terdapat di Kabupaten Semarang masih aktif, sebagian ada yang tercatat sudah tidak aktif. Jumlah koperasi yang masih aktif yaitu 535 dan sisanya 127 merupakan koperasi tidak aktif. Total seluruh jumlah sarana perekonomian di Kabupaten Semarang pada Tahun 2013 yaitu sebanyak 2.951 yang terdiri dari jumlah pasar, sarana perdagangan serta koperasi.

Jumlah sarana perekonomian merupakan salah satu tanda perkembangan keadaan perekonomian suatu daerah. Arsyad (2010) menyatakan bahwa keadaan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari proses yang mencakup sarana perekonomian seperti pasar-pasar baru, pembangunan industri baru, pengembangan perusahaan baru. Banyaknya jumlah sarana perekonomian di Kabupaten Semarang seperti pada Tabel 9 akan memudahkan masyarakat di Kabupaten Semarang untuk mengakses pangan sehingga tingkat ketahanan pangan akan meningkat. Hal ini sesuai pendapat Soekirman (2000) bahwa sistem ketahanan pangan mencakup distribusi yaitu mewujudkan sistem distribusi yang efisien dan efektif untuk menjamin masyarakat agar mudah memperoleh pangan melalui sarana penunjang perekonomian seperti pasar.

4.1.5. Konsumsi dan Pengeluaran

Umumnya konsumsi dan pengeluaran rumah tangga terdiri atas pengeluaran dan konsumsi akan pangan dan non pangan. Menurut BPS_b (2014)

bahwa pengeluaran pangan meliputi pengeluaran belanja untuk padi-padian, umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah-buahan, minyak dan lemak, ikan/udang/cumi/kerang, daging, telur, susu, bumbu-bumbuan, bahan minuman, konsumsi lainnya, makanan dan minuman jadi serta tembakau dan sirih. Pengeluaran non pangan meliputi pengeluaran belanja untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, barang tahan lama, pajak, pungutan dan asuransi, keperluan pesta serta upacara. Tingkat konsumsi dan pengeluaran rumah tangga untuk belanja pangan dan non pangan akan mempengaruhi pangsa pengeluaran pangan rumah tangga tersebut yang mana nantinya juga akan berdampak pada ketahanan pangannya. Rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita per bulan di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Perkapita Per Bulan di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014

Tahun	Jenis Pengeluaran			
	Makanan		Non makanan	
	Rata-rata pengeluaran	Persentase	Rata-rata pengeluaran	Persentase
	---Rp/kap/bln---	---%---	---Rp/kap/bln---	---%---
2010	227.957	15,26	200.247	13,34
2011	299.514	16,95	326.362	17,72
2012	326.531	20,27	438.887	23,66
2013	377.758	22,09	383.839	21,65
2014	437.661	25,43	424.237	23,62
Jumlah	1.500.199	100,00	1.512.809	100,00

Sumber : BPS_b, 2014.

Tabel 10 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita perbulan untuk jenis pengeluaran makanan dari Tahun 2010 sampai 2014 terus mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan perhitungan deflasi dengan harga

konstan Tahun 2010 sampai 2014 yang menunjukkan bahwa ada peningkatan konsumsi pangan secara fisik yang berarti secara riil ada peningkatan kesejahteraan (Lampiran 7). Pada awalnya rata-rata pengeluaran makanan Tahun 2010 sebesar Rp. 228.958,- atau 15,26% kemudian naik menjadi Rp. 254.234,- atau 16,95% pada Tahun 2011 dan mengalami peningkatan lagi pada Tahun 2012 sebesar Rp. 304.017,- atau 20,27%. Pada Tahun 2013 juga mengalami kenaikan lagi menjadi Rp. 331.426,- atau 22,09%.

Hal ini berbeda dengan rata-rata pengeluaran non makanan dari Tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi naik dan turun. Pada Tahun 2010 sebesar Rp. 201.735,- atau 13,34%, kemudian pada Tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi Rp. 268.046,- atau 17,72% serta pada Tahun 2012 mengalami kenaikan lagi menjadi Rp. 357.891,- atau 23,66% akan tetapi pada Tahun 2013 mengalami penurunan menjadi Rp. 327.472,- atau 21,65%. Pada Tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi Rp. 357.665,- atau 23,62%. Hal ini sesuai dengan perhitungan deflasi dengan harga konstan Tahun 2010 menunjukkan bahwa pada Tahun 2010 sampai 2012 mengalami kenaikan yang artinya bahwa ada peningkatan secara fisik konsumsi non pangan secara riil, tetapi pada Tahun 2013 sampai 2014 mengalami penurunan yang artinya bahwa ada penurunan secara fisik konsumsi non pangan secara riil pada Tahun 2013 sampai 2014 (Lampiran 7).

Jika dilihat dari perbandingan rata-rata pengeluaran untuk jenis makanan dari Tahun 2010-2014 lebih rendah dari pada rata-rata pengeluaran untuk jenis non makanan dari Tahun 2010-2014. Rata-rata pengeluaran untuk jenis makanan dari Tahun 2010-2014 sebesar Rp. 1.500.199,- sedangkan rata-rata pengeluaran

untuk jenis non makanan dari Tahun 2010-2014 sebesar Rp. 1.512.809,- sehingga dapat dikatakan bahwa pada Tahun 2010-2014 penduduk di Kabupaten Semarang tahan pangan karena rata-rata pengeluaran untuk non pangan lebih besar dari pada pengeluaran pangan, sehingga dapat diketahui bahwa pangsa pengeluaran pangannya tinggi. Hal ini sesuai dengan Hukum *working* (1943) seperti dikutip oleh Pakpahan *et al.* (1993) dalam Ariningsih dan Handewi (2008) menyatakan bahwa pangsa pengeluaran pangan dan pengeluaran rumah tangga mempunyai hubungan yang negatif, begitu pula dengan ketahanan pangan dan pangsa pengeluaran pangan mempunyai hubungan negatif juga. Artinya apabila suatu rumah tangga semakin besar pangsa pengeluaran pangan untuk pangan berarti semakin rendah ketahanan pangannya, begitu pula sebaliknya. Ariani dan Purwantini (2003) juga menyatakan bahwa ketahanan pangan rumah tangga dapat diketahui dari proporsi pengeluaran pangan dan non pangannya, jika proporsi pengeluaran pangannya semakin tinggi maka tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga semakin rendah atau rentan begitu pula sebaliknya.

4.2. Karakteristik Rumah Tangga Responden

Karakteristik rumah tangga responden merupakan gambaran umum tentang keadaan dan latar belakang responden. Responden dalam penelitian ini adalah petani yang mengusahakan tanaman padi serta buruh tani di Desa Dadapayam, Cukilan, Sukarejo Kecamatan Suruh. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 70 orang. Adapun karakteristik yang dikaji dalam penelitian ini yaitu data-data identitas responden dan keluarga responden yang meliputi

umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga dan kepemilikan lahan.

Karakteristik rumah tangga responden dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Karakteristik Rumah Tangga Responden di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

No.	Uraian	Jumlah ----jiwa----	Persentase -----%-----
1.	Umur (tahun)		
	a. Suami		
	- 20-40	15	21,74
	- 41-60	48	69,57
	- 61-70	6	8,70
	b. Istri		
	- 20-40	22	31,43
	- 41-60	47	67,14
	- 61-70	1	1,43
2.	Pendidikan		
	a. Suami		
	- Tidak Tamat SD	19	27,14
	- SD/Sederajat	29	41,43
	- SMP/Sederajat	14	20,00
	- SMA/Sederajat	7	10,00
	- Akademi/S1	1	1,43
	b. Istri		
	- Tidak Tamat SD	14	20,00
	- SD/Sederajat	34	48,57
	- SMP/Sederajat	14	20,00
	- SMA/Sederajat	7	10,00
	- Akademi/S1	1	1,43
3.	Jumlah Tanggungan Keluarga (orang)		
	- ≤ 2	19	27,14
	- 3-4	37	52,86
	- 5-6	14	20,00
4.	Luas Kepemilikan Lahan		
	- $< 0,50$ ha	46	65,71
	- 0,50-1 ha	15	21,43
	- ≥ 1 ha	9	12,86

Sumber : Data Primer Penelitian, 2016.

Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui bahwa umur responden meliputi 20-40 tahun sebanyak 15 atau 21,74% untuk suami dan 22 atau 31,43% untuk istri,

umur 41-60 sebanyak 48 atau 69,57% untuk suami dan 47 atau 67,14% untuk istri, umur 61-70 sebanyak 6 atau 8,70% untuk suami dan 1 atau 1,43% untuk istri. Rata-rata umur kepala rumah tangga responden adalah 49 tahun sedangkan untuk umur istri rata-rata 46 tahun.

Umur sangat berpengaruh terhadap produktivitas atau daya kerja seseorang. Semakin bertambahnya umur seseorang maka produktivitas seseorang akan meningkat, namun disisi lain juga akan mengalami penurunan setelah melewati masa produktif. Rata-rata umur responden baik kepala keluarga maupun istri masih termasuk dalam kelompok umur produktif.

Rumah tangga responden masih dapat mengerjakan pekerjaan bertaniya dengan maksimal maupun pekerjaan sampingan lainnya karena tergolong dalam masa produktif sehingga pendapatan responden akan meningkat dan rumah tangga responden akan semakin sejahtera. Harwati (2005) menyatakan bahwa pendapatan dipengaruhi oleh umur kepala rumah tangga yang mana semakin tua umur kepala rumah tangga maka produktivitas dalam jam kerja akan semakin menurun, sehingga akan mempengaruhi pendapatan rumah tangga. Selain itu, umur juga berpengaruh terhadap pemenuhan akan kebutuhan gizi.

Setiap rumah tangga memiliki kebutuhan akan gizi yang berbeda-beda tergantung dari usia, jumlah tanggungan keluarga maupun komposisi anggota rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan pendapat Amaliyah dan Handayani (2011) yang menyatakan bahwa kebutuhan akan gizi individu adalah berbeda, umumnya semakin bertambahnya umur akan menuntut pemenuhan gizi yang berbeda, oleh karena itu ketersediaan pangan rumah tangga juga berbeda,

tergantung pada usia, jumlah anggota rumah tangga dan bagaimana komposisi anggota rumah tangga tersebut.

Pendidikan merupakan tingkat pengetahuan petani yang didapat dari sekolah formal. Pendidikan umumnya akan mempengaruhi pola pikir petani dalam menyikapi suatu masalah. Tingkat pendidikan kepala keluarga yang paling banyak adalah tamat SD sebanyak 29 orang atau 41,43%. Demikian juga dengan istri, tingkat pendidikan terbanyak juga tamat SD sebanyak 34 orang atau 48,57%.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden masih tergolong rendah, sehingga mempengaruhi cara berpikir dalam melakukan usahatani. Djiwandi (2002) menyatakan bahwa petani yang memiliki pendidikan tinggi akan mulai menerapkan ilmunya dalam aktivitas bertani agar hasil dari pertaniannya meningkat. Rendahnya pendidikan responden petani dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, keterbatasan biaya dan belum adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Selain tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang rendah, tingkat pendidikan istri juga rendah, padahal seorang ibu selain merupakan modal utama dalam menunjang ekonomi rumah tangga juga berperan dalam pola penyusunan makanan untuk rumah tangga. Arida *et al.* (2015) menyatakan bahwa dalam hal ketahanan pangan, pendidikan berpengaruh pada konsumsi rumah tangga terutama tingkat pendidikan ibu rumah tangga, karena ibu rumah tangga berperan dalam pengambilan keputusan konsumsi pangan rumah tangga. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pendidikan ibu rumah tangga, maka akan semakin tinggi pula

kemampuan dalam hal pengambilan keputusan konsumsi rumah tangga terutama untuk memenuhi kebutuhan gizi seluruh anggota keluarga.

Jumlah tanggungan keluarga responden merupakan satu atau lebih orang yang mendiami sebuah bangunan dan makan bersama dari satu dapur serta menjadi tanggung jawab kepala keluarga. Pada Tabel 11, menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga meliputi jumlah tanggungan ≤ 2 sebanyak 19 orang atau 27,14%, 3-4 sebanyak 37 orang atau 52,86% dan 5-6 sebanyak 14 orang atau 20,00%. Rata-rata jumlah tanggungan keluarga responden sebanyak 3 orang. Umumnya, hanya terdiri dari kepala keluarga, istri dan satu orang anak. Umumnya anak-anak petani yang telah dewasa tidak tinggal bersama dengan orang tuanya karena bekerja di luar daerah ataupun telah menikah. Berdasarkan penelitian di Kabupaten Manokwari, Sianipar *et al.* (2012) mendapatkan bahwa besarnya jumlah anggota rumah tangga akan berpengaruh terhadap konsumsi pangan rumah tangga. Semakin banyak anggota keluarga maka konsumsi pangannya juga akan meningkat.

Luas kepemilikan lahan responden meliputi lahan $< 0,50$ ha sebanyak 46 orang atau 65,71%, lahan 0,50-1 ha sebanyak 15 orang atau 21,43% dan lahan ≥ 1 ha sebanyak 9 orang atau 12,86%. Rata-rata lahan yang dikerjakan petani responden merupakan lahan milik sendiri. Namun demikian ada dua responden yang status kepemilikan lahannya milik sendiri dan sewa. Rata-rata luas lahan petani responden sebesar 0,44 ha. Luas lahan yang dikuasi oleh petani menggambarkan kemampuan modal finansial petani dalam melakukan usahatani.

Mubyarto (1995) menyatakan bahwa luas lahan menjamin jumlah atau hasil yang akan diperoleh petani, jika luas lahan meningkat maka pendapatan akan meningkat begitu pula sebaliknya sehingga hubungan luas lahan dan pendapatan petani merupakan hubungan yang positif. Luas lahan merupakan faktor produksi yang paling penting dibandingkan faktor produksi lain karena balas jasa yang diterima oleh faktor produksi lahan lebih tinggi daripada faktor produksi lain sehingga luas lahan dapat mencerminkan kesejahteraan petani.

4.3. Gambaran Umum Pengeluaran Pangan dan Non Pangan

Pengeluaran rumah tangga merupakan biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Umumnya, pengeluaran rumah tangga terdiri dari dua jenis yaitu pengeluaran pangan dan non pangan. Pengeluaran pangan rumah tangga responden dalam penelitian ini, dihitung selama seminggu yang lalu (Lampiran 5) selanjutnya masing-masing dikonversikan ke dalam rata-rata perbulan. Pengeluaran non pangan rumah tangga responden dihitung selama satu bulan yang lalu (Lampiran 5). Berikut adalah tabel rata-rata proporsi pengeluaran rumah tangga responden.

Tabel 12. Rata-rata Proporsi Pengeluaran Rumah Tangga Responden di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Tahun 2016

Pengeluaran	Nominal -----Rp/bln-----	Persentase -----%-----
Pengeluaran Pangan	590.426	45,50
Pengeluaran Non Pangan	706.924	54,50
Jumlah	1.297.350	100,00

Sumber : Data Primer Penelitian, 2016.

Berdasarkan Tabel 12, dapat diketahui bahwa rata-rata besarnya pengeluaran total rumah tangga responden sebesar Rp.1.297.350,- Pengeluaran total rumah tangga tersebut terdiri dari pengeluaran pangan dan non pangan. Proporsi pengeluaran pangan sebesar Rp. 590.426,- atau 45,50%, sedangkan proporsi pengeluaran non pangan sebesar Rp. 706.924,- atau 54,50%. Hal ini berbeda dengan rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Semarang pada Tahun 2014 yang mana proporsi untuk pangan lebih besar dari pada non pangan yaitu pangan sebesar Rp. 381.475,- atau 51,61% dan non pangan sebesar Rp. 357.675,- atau 48,39%.

Proporsi pengeluaran non pangan rumah tangga responden petani lebih besar dari pada proporsi pengeluaran pangan rumah tangga responden petani, sehingga rata-rata rumah tangga petani di Kecamatan suruh termasuk tahan pangan. Hal ini sesuai pendapat Ariani dan Purwantini (2003) yang menyatakan bahwa ketahanan pangan rumah tangga dapat diketahui dari proporsi pengeluaran pangan dan non pangannya, jika proporsi pengeluaran pangannya semakin tinggi maka tingkat ketahanan pangan rumah tangga semakin rendah tetapi jika proporsi untuk pengeluaran pangannya semakin rendah maka tingkat ketahanan pangan rumah tangga semakin tinggi. Sesuai dengan hukum Engel seperti pada Ilustrasi 1 bahwa tingkat kesejahteraan ditandai dengan meningkatnya pendapatan, maka persentase konsumsi akan barang normal seperti konsumsi untuk pangan akan cenderung turun sedangkan persentase untuk konsumsi barang mewah seperti non pangan cenderung naik, sehingga berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 12 bahwa proporsi pengeluaran pangan lebih kecil dari pada proporsi pengeluaran

non pangan, dapat dikatakan bahwa rata-rata responden di Kecamatan Suruh adalah sejahtera.

Tabel 13. Rata-rata Pengeluaran Pangan per Bulan Rumah Tangga Responden di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Tahun 2016

No.	Pengeluaran Pangan	Rata-rata -----Rp-----	Persentase -----%-----
1	Beras	178.171	30,20
2	Minyak	61.171	10,40
3	Gula Pasir	34.942	6,20
4	The	4.897	0,80
5	Kopi	9.200	1,60
6	Telur	48.857	8,30
7	Daging Ayam	65.857	11,10
8	Daging Sapi	12.857	2,20
9	Tempe	25.943	4,40
10	Tahu	12.514	2,10
11	Ikan	18.686	3,20
12	Sayur	48.571	8,20
13	Buah	19.600	3,30
14	Susu	9.314	1,60
15	Lain-lain	39.842	6,70
Jumlah		590.426	100,00

Sumber : Data Primer Penelitian, 2016.

Tabel 13 menunjukkan bahwa pengeluaran pangan terbesar yaitu untuk konsumsi beras sebesar Rp.178.171,- perbulan atau 30,20% dengan rata-rata harga beras di lingkungan responden tinggal sebesar Rp. 7.000-9.000,- per kg. Pengeluaran pangan terbesar kedua yaitu pengeluaran untuk konsumsi daging ayam sebesar Rp. 65.857,- perbulan atau 11,10%, rata-rata harga daging ayam sebesar Rp 25.000-27.000,- per kg. Selanjutnya pengeluaran untuk minyak goreng sebesar Rp. 61.171 perbulan atau 10,40% dengan harga minyak goreng Rp. 12.000-13.500,- perliter, baik untuk minyak goreng curah maupun minyak goreng bermerk tertentu. Pengeluaran untuk konsumsi telur rumah tangga responden

sebesar Rp. 48.857,- perbulan atau sebesar 8,30% dengan harga telur Rp. 16.000-19.000,- per kg, namun umumnya beberapa rumah tangga responden memelihara ayam sendiri sehingga mereka tidak perlu membeli telur untuk memenuhi kebutuhan harian akan konsumsi telur.

Pengeluaran untuk gula pasir sebesar Rp. 34.942,- perbulan atau 6,20% dengan harga gula pasir mencapai Rp. 12.000-15.000,- per kg. Konsumsi untuk teh sebesar Rp. 4.897,- perbulan atau 0,80%, sedangkan untuk pengeluaran kopi sebesar Rp. 9.200,- perbulan atau 1,60%. Pengeluaran akan konsumsi daging sapi cukup rendah yaitu sebesar Rp. 12.857,- perbulan atau 2,20%, hal ini dikarenakan harga daging sapi yang cukup mahal per kg yang mencapai Rp. 100.000,- umumnya rumah tangga responden hanya mengkonsumsi daging sapi 0,25-0,50 kg. Pengeluaran untuk tempe sebesar Rp. 25.943,- perbulan atau sebesar 4,40%, sedangkan pengeluaran untuk tahu sebesar Rp.12.514,- perbulan atau 2,10%, rumah tangga responden petani membeli tahu atau tempe dengan harga Rp. 2.000-3000,-

Pengeluaran untuk konsumsi ikan mencapai Rp. 18.686,- perbulan atau 3,20%. Jenis ikan yang umumnya dikonsumsi responden yaitu ikan lele, ikan mas, gereh, pindang, ikan asin, teri dan ikan sungai. Harga ikan lele, ikan mas dan pindang yang biasanya dibeli rumah tangga responden sebesar Rp.8.000-20.000,- sedangkan untuk gereh, ikan asin, teri dan ikan sungai sebesar Rp. 2.500-5.000,- Pengeluaran untuk sayur sebesar Rp. 48.571,- perbulan atau 8,20%. Sayur yang biasanya dikonsumsi responden yaitu bayam, kangkung, sawi, kacang-kacangan, terong, kol, pohong, daun ketela, daun pepaya, ciper dan gambas. Sayur-sayuran

tersebut rata-rata diambil dari kebun maupun menanam sendiri di halaman rumah tempat tinggal responden. Pengeluaran untuk konsumsi buah-buahan yaitu sebesar Rp. 19.600,- perbulan atau 3,30%. Buah-buahan yang dikonsumsi meliputi salak, jeruk, apel, nanas, melon dan semangka. Sedangkan untuk buah-buahan seperti pisang, mangga, sirsat, pepaya, srikaya, belimbing, jambu dan nangka didapatkan responden dari kebun atau menanam sendiri disekitar halaman rumah responden. Pengeluaran untuk susu sebesar Rp. 9.314,- perbulan atau 1,60%, sebagian besar dari responden jarang yang mengkonsumsi susu seperti pada Lampiran 5, harga susu yang dibeli responden berkisar antara Rp. 10.000-13.000,- per kaleng. Pengeluaran lain-lain mencapai Rp. 39.842,- perbulan atau 6,70%. Pengeluaran lain-lain yaitu seperti mie instan, bumbu dapur dan sebagainya.

Tabel 14. Rata-rata Pengeluaran Non Pangan per Bulan Rumah Tangga Responden di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Tahun 2016

No.	Pengeluaran Non Pangan	Rata-rata -----Rp-----	Persentase -----%-----
1	Listrik	55.429	7,80
2	Air	15.321	2,20
3	Pendidikan/Sekolah	249.500	35,30
4	Rokok	69.600	9,80
5	Kesehatan	11.643	1,60
6	Pajak	8.689	1,20
7	Gas/kayu	36.314	5,10
8	Bayar Pinjaman	213.429	30,10
9	Lain-lain	47.000	6,60
Jumlah		706.924	100,00

Sumber : Data Primer Penelitian, 2016.

Berdasarkan Tabel 14, dapat diketahui bahwa pengeluaran untuk non pangan terbesar yaitu untuk pendidikan/sekolah sebesar Rp. 249.500,- perbulan

atau 2,20%. Selanjutnya, untuk pengeluaran non pangan terbesar kedua adalah untuk bayar pinjaman sebesar Rp. 213.429,- perbulan atau 30,10%, bayar pinjaman ini meliputi bayar sewa lahan, kredit seperti motor, barang elektronik, bayar untuk pelunasan hutang dan lain sebagainya. Pengeluaran untuk listrik mencapai Rp. 55.429,- perbulan atau 7,80%, sedangkan pengeluaran untuk air sebesar Rp. 15.321,- perbulan atau 2,20%. Pengeluaran untuk air rumah tangga responden dapat dikatakan sedikit karena sebagian besar dari responden memiliki sumur pribadi. Pengeluaran untuk rokok mencapai Rp.69.600,- perbulan atau 9,80%, rokok yang dikonsumsi responden ini meliputi rokok dengan merk tertentu maupun rokok dengan cara membeli tembakau sendiri. Pengeluaran untuk kesehatan mencapai Rp. 11.643,- perbulan atau 1,60%, sebagian besar responden yang sakit berobat ke puskesmas disekitar daerah responden, puskesmas ini menggratiskan seluruh biaya pengobatan bagi warga desa rumah tangga responden. Responden yang tempat tinggalnya jauh dari puskesmas akan memilih berobat ke bidan dekat tempat tinggalnya dengan harga sekitar Rp. 20.000-25.000,- sekali berobat. Pengeluaran untuk pajak mencapai Rp. 8.689,- perbulan atau 1,20%, pajak ini meliputi pajak sawah, rumah tempat tinggal dan pajak kebun. Pengeluaran untuk gas atau kayu mencapai Rp. 36.314,- perbulan atau 5,10%. Rata-rata rumah tangga responden menghabiskan 2 tabung gas ukuran 3 kg dalam sebulan (Lampiran 5) dengan harga kisaran Rp. 19.000-20.000,- per tabung, akan tetapi terdapat juga beberapa responden yang menggunakan kayu untuk memasak yang diambil dari kebun sendiri. Pengeluaran untuk lain-lain meliputi pengeluaran yang tidak terduga seperti pengeluaran yang digunakan

untuk menjenguk orang sakit, untuk kondangan/nikahan dan sebagainya, pengeluaran ini sebesar Rp. 47.000,- perbulan atau 6,60%.

4.3. Proporsi Pengeluaran Pangan dan Non Pangan Responden

Pangsa pengeluaran pangan merupakan rasio antara pengeluaran pangan dengan pengeluaran total rumah tangga perbulan. Pangsa pengeluaran pangan dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengukur ketahanan pangan rumah tangga. Jonsson dan Toole (1991) dalam Maxwell *et al.* (2000) menyatakan bahwa jika pangsa pengeluaran pangan kurang dari 60% maka rumah tangga tersebut tahan pangan, tetapi jika pangsa pengeluaran pangan lebih dari sama dengan 60% maka rumah tangga tersebut rawan pangan. Jumlah sebaran kategori pangsa pengeluaran pangan rumah tangga di Kecamatan Suruh dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Sebaran Kategori Tingkat Pangsa Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Responden di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Tahun 2016

Kategori	Jumlah	Persentase
	-----jiwa-----	-----%-----
Pangsa Pengeluaran Pangan < 60%	53	75,70
Pangsa Pengeluaran Pangan ≥ 60%	17	24,30
Jumlah	70	100,00

Sumber : Data Primer Penelitian, 2016.

Tabel 16. Hasil Analisis One Sampel T-Test Rumah Tangga Petani di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang

	N	Mean	t-hit	df	Sig (2-tailed)
Pangsa pengeluaran pangan	70	50,8286	-5,509	69	0,000

Sumber : Data Primer Penelitian, 2016.

Berdasarkan Tabel 15 dapat diketahui bahwa, jumlah responden dalam penelitian ini adalah 70 orang. Jumlah rumah tangga responden dengan kategori pangsa pengeluaran pangan $< 60\%$ sebanyak 53 responden atau 75,70% artinya jumlah rumah tangga responden dengan kategori tahan pangan sebanyak 53 responden, sedangkan jumlah rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan $\geq 60\%$ sebanyak 17 responden atau 24,30% artinya jumlah rumah tangga dengan kategori tidak tahan pangan sebesar 17 responden. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga responden di Kecamatan Suruh termasuk dalam kategori tahan pangan. Tabel 16 menunjukkan hasil output one sampel t-test nilai signifikannya 0,00 kurang dari 0,05 sehingga H_0 ditolak H_1 diterima artinya bahwa rata-rata pangsa pengeluaran pangan responden tidak lebih dari 60% yang berarti bahwa rata-rata responden adalah tahan pangan.

Hal ini berbeda dengan penelitian di Kabupaten Klaten yang dilakukan oleh Amaliyah dan Handayani (2011) yang menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan rumah tangga petani padi di Kabupaten Klaten sebagian besar adalah rentan pangan yaitu sebesar 53,33%, sisanya rawan pangan 20,00%, tahan pangan 16,67% dan rawan pangan 10,00%. Padahal Klaten merupakan salah satu lumbung padi Jawa Tengah karena pada Tahun 2009-2013 Kabupaten Klaten selalu surplus beras dengan rata-rata 60.833 ton/tahun.

Tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pendapatan, harga bahan pokok, jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, pengetahuan gizi, konsumsi akan protein hewani dan nabati serta lingkungan tempat tinggal. Purwaningsih *et al.*

(2010) berpendapat bahwa lingkungan tempat tinggal dan pola konsumsi berpengaruh terhadap ketahanan pangan rumah tangga contohnya seperti rumah tangga di wilayah perkotaan umumnya mempunyai proporsi pengeluaran beras yang cenderung lebih sedikit sehingga pangsa pengeluaran pangannya akan rendah dan memiliki tingkat ketahanan pangan yang tinggi. Proporsi pengeluaran beras berbeda dengan rumah tangga yang tinggal di wilayah pedesaan karena umumnya pada masyarakat pedesaan proporsi pengeluaran beras cukup tinggi sehingga mengakibatkan pangsa pengeluaran pangannya tinggi dan ketahanan pangannya rendah.

4.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pangsa Pengeluaran Pangan

Berdasarkan uji normalitas data dengan menggunakan analisis grafik menunjukkan bahwa output histogram kurva dependent dan *regression standardized* residual membentuk gambar seperti lonceng dan Normal P-P Plot *Regression Standardized* terlihat titik-titik menyebar di garis diagonal (Lampiran 8), oleh karena itu analisis regresi layak digunakan. Hal ini seperti pendapat Suliyanto (2011) yang menyatakan bahwa jika uji normalitas menggunakan analisis grafik dengan hasil output histogram kurva dependent dan *regression standardized* residual membentuk gambar seperti lonceng dan Normal P-P Plot *Regression Standardized* terlihat titik-titik menyebar di garis diagonal, maka analisis regresi layak untuk digunakan. Berdasarkan uji multikolinearitas didapatkan hasil bahwa tidak ada nilai Tolerance di bawah 0,10 nilai VIF tidak ada yang diatas 10 (Lampiran 9) sehingga terbukti tidak terjadi multikolonieritas.

Hal ini sesuai pernyataan Ghozali (2011) yang menyatakan bahwa untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah dengan nilai dari Tolerance $> 0,10$ atau sama dengan nilai VIF < 10 .

Suliyanto (2011) menyatakan bahwa model persamaan regresi tidak mengandung masalah autokolerasi jika nilai Durbin-Watson berada diantara nilai d_U hingga $(4-d_U)$ seperti pada ilustrasi gambar berikut dibawah ini :



Ilustrasi 3. Kriteria Pengujian Autokolerasi menurut Suliyanto (2011)

Berdasarkan uji autokolerasi didapatkan nilai DW sebesar 2,145 (Lampiran 8), nilai ini dibandingkan dengan menggunakan Tabel Durbin-Watson dengan jumlah sampel 70 serta jumlah variabel bebas 7, nilai Durbin Watson sebesar $d_l = 1,401$ dan $d_u = 1,837$, sehingga nilai $4 - d_U$ sebesar $4 - 1,837 = 2,450$. Karena nilai Durbin-Watson (2,145) terletak antara d_U dengan $4 - d_U$, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tersebut tidak mengandung masalah autokolerasi.

Uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tampilan pada scatterplot terlihat bahwa plot menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu *Regression Studentized Residual* (Lampiran 9), oleh karena itu berdasarkan

uji heteroskedastisitas menggunakan metode grafik, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Ghozali (2011) bahwa apabila pada scatterplot terlihat polanya acak serta tersebar, menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengaruh pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan ibu rumah tangga, harga bahan pokok beras, pengetahuan gizi, konsumsi protein hewani serta *dummy* konsumsi harian protein nabati dan hewani terhadap pangsa pengeluaran pangan rumah tangga di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dapat dilihat melalui Koefisien Determinasi (R^2), uji F dan uji t berikut ini :

a. Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen yaitu pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan ibu rumah tangga, harga bahan pokok beras, pengetahuan gizi, konsumsi protein hewani serta *dummy* konsumsi harian protein nabati dan hewani dalam menjelaskan variabel dependen yaitu pangsa pengeluaran pangan rumah tangga. Koefisien Determinasi (R^2) dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2) Rumah Tangga Petani di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,775	0,600	0,555	9.28971

Sumber : Data Primer Penelitian, 2016.

Berdasarkan Tabel 17 dapat diketahui bahwa besarnya nilai *R Square* sebesar 0,600 hal ini berarti 60% variasi pangsa pengeluaran pangan dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel pendapatan, jumlah tanggungan keluarga,

pendidikan ibu rumah tangga, harga bahan pokok beras, pengetahuan gizi, konsumsi protein hewani serta *dummy* konsumsi harian protein nabati dan hewani. Sedangkan sisanya ($100\% - 60\% = 40\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. Nilai R Square penelitian ini tidak jauh berbeda penelitian yang di lakukan oleh Pratiwi *et al.* (2014) di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali yang menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 0,649 atau 64,9% yang artinya variabel dependen yaitu ketahanan pangan dengan pendekatan pengeluaran rumah tangga dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu pendapatan rumah tangga, lama pendidikan formal ibu rumah tangga, jumlah anggota keluarga, kepemilikan aset produktif, jumlah subsidi raskin yang diterima dan harga beras sebesar 64,9%. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sianipar *et al.* (2012) di Kabupaten Manokwari yang menunjukkan hasil analisis regresi tingkat ketahanan pangan pada petani diperoleh nilai R *square* yang sangat tinggi yaitu sebesar 98,53% yang berarti bahwa variasi ketahanan pangan dapat dijelaskan oleh variabel jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, harga beras, gula, sayur, ikan, telur, minyak goreng, minyak tanah, pendapatan dan *dummy* petani sebesar 98,53%

b. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan ibu rumah tangga, harga bahan pokok beras, pengetahuan gizi, konsumsi protein hewani dan *dummy* konsumsi harian protein nabati dan hewani terhadap nilai variabel dependen yaitu pangsa pengeluaran pangan rumah tangga. Hasil uji F disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Hasil Analisis Uji F Rumah Tangga Petani di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	8035,422	7	1147,917	13,302	0,000**
Residual	5350,521	62	86,299		
Total	13385,943	69			

Sumber : Data Primer Penelitian, 2016.

Keterangan :

** = sangat signifikan (1%)

Berdasarkan analisis uji F yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal tersebut berarti secara serempak variabel independen yaitu pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan ibu rumah tangga, harga bahan pokok beras, pengetahuan gizi, konsumsi protein hewani serta *dummy* konsumsi harian protein nabati dan hewani berpengaruh sangat nyata terhadap variabel dependen yaitu pangsa pengeluaran rumah tangga dengan tingkat kesalahan 1%. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sianipar *et al.* (2012) di Kabupaten Manokwari bahwa dari uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 476,248 lebih besar dari nilai F-tabel 1%, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, harga beras, gula, sayur, ikan, telur, minyak goreng, minyak tanah, pendapatan dan *dummy* petani secara serempak berpengaruh sangat nyata terhadap variabel dependen yaitu tingkat ketahanan pangan dengan tingkat kesalahan 1%. Pratiwi *et al.* (2014) dalam penelitiannya di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali juga menunjukkan bahwa hasil uji F yang telah dilakukan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya variabel independen yaitu pendapatan rumah tangga, lama pendidikan formal ibu rumah tangga, jumlah anggota

keluarga, kepemilikan aset produktif, jumlah subsidi raskin yang diterima dan harga beras secara serempak berpengaruh nyata terhadap ketahanan pangan pangan rumah tangga dengan pendekatan pengeluaran pangan rumah tangga.

c. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yaitu yaitu pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan ibu rumah tangga, harga bahan pokok beras, pengetahuan gizi, konsumsi protein hewani serta konsumsi harian protein nabati dan hewani terhadap variabel dependen yaitu pangsa pengeluaran rumah tangga. Berikut adalah tabel hasil analisis uji t.

Tabel 19. Hasil Analisis Uji t Rumah Tangga Petani di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang

Variabel	B	Sig.
Pendapatan	-3,850E-6	0,002**
Jumlah tanggungan keluarga	2,435	0,017*
Pendidikan ibu rumah tangga	-1,240	0,001**
Harga bahan pokok beras	0,001	0,813 ^{ns}
Pengetahuan gizi	2,057	0,000**
Konsumsi protein hewani	-0,004	0,798 ^{ns}
<i>Dummy</i> Konsumsi harian protein hewani dan nabati	-4,650	0,120 ^{ns}

Sumber : Data Primer Penelitian, 2016.

Keterangan :

** = sangat signifikan (1%)

* = signifikan (5%)

ns = tidak signifikan

Koefisien regresi pendapatan (X_1) sebesar -3,850E-6; jumlah tanggungan keluarga (X_2) sebesar 2,438; pendidikan ibu rumah tangga (X_3) sebesar -1,240; harga bahan pokok beras (X_4) sebesar 0,001; pengetahuan gizi (X_5) sebesar 2,057;

konsumsi protein hewani (X_6) sebesar -0,004 dan *dummy* (X_7) sebesar -4,650 dan nilai konstanta yang diperoleh sebesar 43,846 (Lampiran 11) sehingga model persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = 43,86 - 3,850E-6X_1 + 2,438X_2 - 1,240X_3 + 0,001X_4 + 2,057X_5 - 0,004X_6 - 4,650X_7 \dots\dots\dots (6)$$

Keterangan :

- Y = Pangsa pengeluaran pangan rumah tangga (%)
- X_1 = Pendapatan (Rp/bulan)
- X_2 = Jumlah tanggungan keluarga (Jiwa)
- X_3 = Pendidikan ibu rumah tangga (Tahun)
- X_4 = Harga bahan pokok beras (Rp/kg)
- X_5 = Pengetahuan gizi (skor)
- X_6 = Konsumsi protein hewani (Gram/kapita/minggu)
- X_7 [(dummy)] = 1 = Selalu ada protein hewani dan nabati
= 0 = Tidak selalu ada protein hewani dan nabati

Berdasarkan analisis uji t diperoleh hasil yaitu variabel independen pendapatan, pendidikan ibu rumah tangga dan pengetahuan gizi berpengaruh sangat nyata terhadap variabel dependen pangsa pengeluaran pangan dengan tingkat kesalahan 1%. Variabel independen jumlah tanggungan keluarga berpengaruh nyata terhadap variabel independen pangsa pengeluaran pangan pada tingkat kesalahan 5%. Sedangkan untuk sisanya yaitu harga bahan pokok beras, konsumsi protein hewani serta *dummy* konsumsi harian protein hewani dan nabati

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu pangsa pengeluaran rumah tangga.

Variabel independen pendapatan berpengaruh sangat nyata terhadap pangsa pengeluaran rumah tangga sebesar $-3,850E-6$ yang artinya jika pendapatan naik sebesar satu satuan maka pangsa pengeluaran pangan akan turun sebesar $3,850E-6$. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sianipar *et al.* (2012) di Kabupaten Manokwari yang menunjukkan bahwa pada uji t yang dilakukan, pendapatan berpengaruh nyata terhadap ketahanan pangan rumah tangga dengan tingkat kesalahan 1%. Pendapatan merupakan faktor utama dalam pengeluaran pangan dan non pangan rumah tangga sehingga berpengaruh terhadap pangsa pengeluaran pangan rumah tangga, jika pendapatan naik maka pangsa pengeluaran rumah tangga akan turun yang berarti tingkat ketahanan pangan atau kesejahteraan rumah tangga meningkat, begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Ayu *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa pangsa pengeluaran pangan rumah tangga dipengaruhi oleh pendapatan, karena pendapatan merupakan faktor utama dalam pengeluaran pangan dan non pangan rumah tangga. Umumnya pendapatan petani umumnya dipengaruhi oleh luas lahan yang dimiliki, pendidikan petani, umur, teknologi yang digunakan.

Variabel independen jumlah tanggungan keluarga berpengaruh terhadap pangsa pengeluaran pangan rumah tangga sebesar 2,435. Hal ini berarti setiap kenaikan jumlah tanggungan keluarga sebesar satu satuan maka pangsa pengeluaran pangan akan naik sebesar 2,435. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi *et al.* (2014) di Kecamatan Andong Kabupaten

Boyolali yang menunjukkan bahwa hasil uji t variabel independen jumlah anggota keluarga berpengaruh nyata terhadap ketahanan pangan dengan pendekatan pengeluaran pangan rumah tangga pada tingkat kesalahan 5%. Pengeluaran pangan dan non pangan yang dikeluarkan rumah tangga setiap bulannya dipengaruhi oleh faktor jumlah tanggungan keluarga. Hal ini sesuai dengan pernyataan Djiwandi (2002) bahwa jika semakin kecil jumlah tanggungan keluarga petani maka akan mempermudah petani tersebut untuk menyusun anggaran belanja keluarga sesuai pendapatan yang diterima bahkan mungkin masih bisa menabung atau menginvestasikan ke usaha tertentu, namun bagi petani yang jumlah tanggungan keluarga relatif besar akan terbatas menyusun anggaran belanja rumah tangga karena bagi keluarga tersebut mungkin pendapatannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangannya saja.

Koefisien regresi pendidikan ibu rumah tangga sebesar -1,240 yang berarti bahwa jika pendidikan ibu rumah tangga naik sebesar satu satuan maka pangsa pengeluaran pangan akan turun sebesar 1,240. Pendidikan seorang ibu rumah tangga merupakan faktor penting dalam pola penyusunan makanan untuk rumah tangga, karena semakin tinggi pendidikan ibu rumah tangga maka penyusunan anggaran yang dikeluarkan akan cenderung memperbaiki kualitas gizi makanan.

Hal tersebut sesuai penelitian yang dilakukan oleh Sianipar *et al.* (2012) di Kabupaten Manokwari yang menunjukkan bahwa pendidikan petani berpengaruh terhadap tingkat ketahanan pangan rumah tangga dengan tingkat kesalahan 5% dan semakin tinggi tingkat pendidikan petani akan menyebabkan pangsa pengeluaran pangannya rendah. Hal ini disebabkan tingginya tingkat pendidikan

petani tersebut maka petani akan mampu untuk memperbaiki kualitas makanan yang dikonsumsi, baik dari segi makanannya, jumlahnya maupun gizinya. Harga bahan pokok beras secara signifikan tidak berpengaruh terhadap pangsa pengeluaran pangan rumah tangga, namun memiliki koefisien regresi sebesar 0,001 artinya jika harga bahan pokok beras naik sebesar satu satuan maka pangsa pengeluaran pangan akan naik sebesar 0,001.

Darwanto (2005) menyatakan bahwa semakin tinggi harga bahan pokok maka akan mempengaruhi pengeluaran pangan rumah tangga, selain itu bahan pokok tersebut juga akan sulit untuk ditemukan atau langka hal ini membuat rumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi untuk keluarganya sehingga kesejahteraan petani akan semakin rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi harga bahan pokok maka akan berpengaruh terhadap pengeluaran pangan yang semakin tinggi juga sehingga pangsa pengeluaran pangan akan naik yang berarti ketahanan pangan rumah tangga tersebut semakin rendah atau rawan pangan.

Variabel independen pengetahuan gizi sangat berpengaruh nyata terhadap pangsa pengeluaran pangan rumah tangga karena memiliki nilai signifikan $\leq 0,01$. Koefisien regresi pengetahuan gizi sebesar 2,057 yang berarti bahwa jika pengetahuan gizi naik sebesar satu satuan maka pangsa pengeluaran pangan akan naik sebesar 2,057. Semakin tinggi tingkat pengetahuan gizi terutama ibu rumah tangga maka akan cenderung lebih konsumtif terhadap kebutuhan pangan dari pada kebutuhan non pangan sehingga pengeluaran untuk pangannya akan lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk non pangannya. Hal ini menyebabkan

pangsa pengeluaran pangan rumah tangga akan semakin naik yang berarti bahwa rumah tangga tersebut rawan pangan jika dilihat dari penggunaan pangsa pengeluaran pangan sebagai indikator untuk mengukur ketahanan pangan rumah tangga. Hal ini tentu saja berbeda dengan pendapat Warih (2012) yang menyatakan bahwa semakin baik pengetahuan gizi ibu maka dalam memilih makanan akan melakukan pertimbangan dan pengetahuan tentang nilai gizi makanan sehingga kebutuhan gizi rumah tangga terpenuhi dan rumah tangga tersebut semakin sejahtera.

Variabel independen konsumsi protein hewani secara signifikan tidak berpengaruh terhadap pangsa pengeluaran pangan rumah tangga karena memiliki nilai signifikan $> 0,05$. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilham dan Sinaga (2008) yang menunjukkan bahwa ada hubungan linier antara ketahanan pangan dengan pangsa pengeluaran pangan yang diprosi dari konsumsi protein dan konsumsi energi per kapita penduduk artinya bahwa semakin tinggi pendapatan, pangsa pengeluaran pangan akan turun tetapi sebaliknya konsumsi energi dan protein akan semakin meningkat sehingga ketahanan pangan akan semakin meningkat juga. Koefisien regresi konsumsi hewani sebesar $-0,004$ yang berarti jika konsumsi protein hewani naik sebesar satu satuan maka pangsa pengeluaran pangan akan turun sebesar $0,004$.

Peningkatan konsumsi akan protein hewani seperti telur, daging ayam dan daging sapi dapat dipengaruhi oleh pendapatan. Seseorang yang berpendapatan tinggi maka konsumsi akan protein hewani seperti telur, daging ayam dan daging sapi cenderung meningkat. Hal ini akan berdampak terhadap anggaran

pengeluaran rumah tangga, dimana pengeluaran pangannya akan semakin meningkat tetapi persentasinya tidak melampaui besarnya persentasi akan konsumsi non pangan karena peningkatan konsumsi protein hewani mengindikasikan peningkatan pendapatan sehingga pangsa pengeluaran pangannya akan tetap turun.

Koefisien regresi untuk variabel *dummy* yaitu konsumsi harian protein nabati dan hewani sebesar -4,650. Hal ini berarti bahwa jumlah rumah tangga petani yang konsumsi hariannya selalu ada protein hewani dan nabati lebih rendah dibandingkan jumlah rumah tangga petani yang konsumsi hariannya tidak selalu ada protein hewani dan nabati sebesar 4,650 atau rata-rata jumlah rumah tangga petani yang konsumsi hariannya selalu ada protein hewani dan nabati sebesar 39,196 ($43,846 - 4,650$).